|  |  |
| --- | --- |
|  | **LOGO PIHAK KEDUA** |

**PERJANJIAN KERAHASIAAN**

**(*NON DISCLOSURE AGREEMENT*)**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DENGAN**

**(KEMENTERIAN \_\_\_\_\_\_\_ / LEMBAGA \_\_\_\_\_\_ / PEMERINTAH DAERAH PROVINSI \_\_\_\_\_\_)\***

**TENTANG**

**PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA**

**REGISTRASI SOSIAL EKONOMI**

**NOMOR : ……………./2024**

**NOMOR : ……………./2024**



Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan … pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_, tahun dua ribu dua puluh \_\_\_\_ (\_\_-\_\_-\_\_\_\_), oleh dan antara:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **TENI WIDURIYANTI** | : | Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TPA Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.** |
| 1. **………………………** | : | (Sekretaris Kementerian **\_\_\_\_\_\_** / Sekretaris Utama Badan **\_\_\_\_\_\_** / Sekretaris Daerah Provinsi **\_\_\_\_\_\_**)\*, berdasarkan Keputusan …. Nomor …. Tentang…, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Kementerian **\_\_\_\_\_\_** / Lembaga **\_\_\_\_\_\_** / Pemerintah Daerah Provinsi **\_\_\_\_\_\_**)\*, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.** |

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**, dan masing-masing disebut **Pihak**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **Pihak Pertama** adalah instansi kementerian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya, melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan pembangunan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional, serta tugas dan fungsi lain yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **Pihak Kedua** adalah (*menyebutkan tugas, fungsi, dan wewenang Pihak Kedua*);
3. bahwa **Para Pihak** telah menyepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **“PKS”**) yang ditandatangani bersamaan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) ini;
4. **Pihak Pertama** bermaksud untuk mengungkapkan suatu informasi yang bersifat rahasia kepada **Pihak Kedua** yang berhubungan dengan program pemerintah yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**  yang diperlukan oleh **Pihak Kedua**  dalam rangka pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Data Regsosek) untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan program pemerintah;
5. bahwa **Pihak Kedua** menjamin informasi yang diberikan dan disampaikan oleh **Pihak Pertama** selama berlangsungnya pembicaraan dan/atau selama pelaksanaan kerja sama akan dijaga kerahasiaannya oleh **Pihak Kedua** dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan **Para Pihak**;
6. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan **PKS** tersebut, **Pihak Pertama** akan mengungkapkan Data Regsosek kepada **Pihak Kedua**, yang oleh **Pihak Pertama** dianggap sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia (“Informasi Rahasia”); dan
7. **Pihak Pertama** akan mengungkapkan Data Regsosek sebagaimana dimaksud pada huruf f melalui pemberian hak akses dengan memberikan Akun Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat) kepada **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) tentang Pemberiak Hak Akses dan Pemanfaatan Data Regsosek, yang selanjutnya disebut **“Perjanjian”** dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini:

1. Data Regsosek (“Informasi Rahasia”) merupakan data dan informasi yang pengelolaannya dikoordinasikan oleh **Pihak Pertama** dan merupakan barang milik negara berupa aset tak berwujud, serta dapat diakses melalui Akun Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat), baik asli maupun salinan:
2. yang secara substansi mengandung data dan informasi yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. yang diberi tanda atau dinyatakan oleh **Pihak Pertama** sebagai rahasia;
4. yang diperlakukan oleh **Pihak Pertama** sebagai rahasia; dan
5. yang seharusnya diketahui oleh **Pihak Kedua** sebagai rahasia.
6. Akun Sepakat (“Informasi Rahasia”) merupakan informasi nama pengguna (*username*)dan kata sandi (*password*) yang digunakan untuk mengakses data dan informasi yang tersedia di dalam Sepakat.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu yang selanjutnya disebut Sepakat merupakan sistem informasi yang menjadi bagian dari sistem Regsosek dan digunakan oleh Pengguna Data untuk mengakses, mengolah, dan memanfaatkan Data Regsosek sesuai dengan hak akses yang diberikan.
8. Pengguna Data merupakan (unit kerja di Kementerian **\_\_\_\_\_\_\_\_** / unit kerja di Lembaga **\_\_\_\_\_\_\_\_** / perangkat daerah di Pemerintah Daerah Provinsi **\_\_\_\_\_\_\_\_** )\* sebagai unsur dari **Pihak Kedua** yang mendapatkan Akun Sepakat.
9. Operator merupakan pejabat di lingkungan Pengguna Data yang berwenang dan ditugaskan sebagai pengelola Akun Sepakat.
10. Pegawai merupakan orang yang bekerja di lingkungan Pengguna Data yang ditugaskan sebagai pengelola harian Akun Sepakat.

**PASAL 2**

**KETENTUAN MENJAGA KERAHASIAAN**

1. **Pihak Kedua** setuju untuk tidak menggunakan Data Regsosek untuk tujuan yang lain, selain sebagaimana dimaksud dalam **PKS** dan tidak akan mengungkapkan, dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari Data Regsosek, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh **Pihak Pertama** atau pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** menjamin bahwa informasi yang diberikan dan disampaikan oleh **Pihak Pertama** selama berlangsungnya pembicaraan dan/atau selama pelaksanaan kerja sama akan dijaga kerahasiaannya oleh **Pihak Kedua** dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan **Para Pihak**.
3. Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan sebelumnya, **Pihak Kedua** hanya dapat mengungkapkan Akun Sepakat dan Data Regsosekkepada Pengguna Data cq Operator yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengetahui Data Regsosek dengan tujuan yang sama dengan yang diterima oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** setuju untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari Akun Sepakat dan Data Regsosek, menyediakan segala perlindungan yang diperlukan terhadap segala pengungkapan yang tidak sah, tiruan atau penggunaan, dan untuk meminta kepada Pengguna Data, Operator, dan Pegawaiyang menerima Akun Sepakat dan Data Regsosek tersebut untuk tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaannya sesuai dengan **Perjanjian** ini.
5. **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk menjamin dan membebaskan **Pihak Pertama** untuk melakukan setiap dan segala tindakan, klaim, kerusakan, dan kerugian yang terjadi pada **Pihak Pertama** dikarenakan pengungkapan yang tidak sah yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada pihak ketiga yang dibuat secara bertentangan dengan **Perjanjian** ini atau segala pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**, Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawai,serta **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas segala tindakan, klaim, kerusakan, dan kerugian yang timbul atas pengungkapan yang tidak sah yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**,Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawai.
6. **Pihak Kedua** dengan ini bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat atau merupakan Akun Sepakat dan Data Regsosek termasuk dokumen, baik berupa Salinan Keras dan Salinan Lunak yang terpisah dari semua dokumen lain pada tempat **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Kedua** akan memberitahu **Pihak Pertama** dengan segera pada saat penemuan atas setiap penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Akun Sepakat dan Data Regsosek atau pelanggaran perjanjian oleh **Pihak Kedua**, Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawai, dan akan bekerja sama dengan **Pihak Pertama** dalam setiap cara untuk membantu **Pihak Pertama** mendapatkan kembali penguasaan atas Akun Sepakat dan Data Regsosek dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

**PASAL 3**

**KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MENGUNGKAPKAN**

1. **Pihak Pertama** berhak untuk memastikan bahwa **Pihak Kedua** akanmenjaga kerahasiaan Akun Sepakat dan Data Regsosek yang hak aksesnya diberikan oleh **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** mengakui kerahasiaan Akun Sepakat dan Data Regsosek dan setuju untuk menjaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.
3. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas kebocoran Akun Sepakat dan Data Regsosek dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawaidan bertanggung jawab atas segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul akibatnya serta membebaskan **Pihak Pertama** dari segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul dimaksud, selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan atas kelalaian **Pihak Kedua,** Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawai.
4. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk:
5. menjaga kerahasiaan Akun Sepakat dan Data Regsosek secara hati-hati dan digunakan sesuai dengan tujuan **Perjanjian**;
6. membatasi informasi Akun Sepakat hanya kepada Operator;
7. tidak memberikan Akun Sepakat kepada pihak lain; dan
8. memberitahukan kepada Pengguna Data untuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian** ini.
9. Pengguna Data berkewajiban untuk:
10. membatasi Akun Sepakat hanya kepada Operator; dan
11. memberitahukan kepada Operator yang telah mendapatkan informasi Akun Sepakat mengenai kewajiban-kewajiban mereka menurut **Perjanjian** ini.
12. Operator berkewajiban untuk:
13. menjaga kerahasiaan Akun Sepakat dan Data Regsosek secara hati-hati dan digunakan sesuai dengan tujuan **Perjanjian**;
14. tidak memberikan Akun Sepakat kepada pihak lain, kecuali kepada Pegawai; dan
15. memberitahukan kepada Pegawai yang telah mendapatkan informasi Akun Sepakat mengenai kewajiban-kewajiban mereka menurut **Perjanjian** ini.
16. Pegawai berkewajiban untuk:
17. menjaga kerahasiaan Akun Sepakat dan Data Regsoseksecara hati-hati dan digunakan sesuai dengan tujuan **Perjanjian**; dan
18. tidak memberikan Akun Sepakat kepada pihak lain.

**PASAL 4**

**PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN**

Apabila disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah suatu kewenangan atau pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, **Pihak Kedua** dapat mengungkapkan Data Regsosek kepada pejabat pemerintah yang berwenang, dengan syarat:

1. mengajukan permohonan tertulis kepada **Pihak Pertama** dan mendapatkan persetujuan dari **Pihak Pertama** sebelum melakukan pengungkapan tersebut; dan
2. **Pihak Kedua** wajib membatasi lingkup pengungkapan tersebut sebatas bagian Data Regsosek yang disyaratkan secara hukum untuk diungkapkan sehingga **Pihak Pertama** dapat memiliki waktu yang cukup untuk menelaah keterbukaan tersebut dan/atau mendapatkan pelindungan secara hukum.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU**

1. **Perjanjian** ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan informasi rahasia yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama**, akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **Para Pihak** tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya **Perjanjian**.
2. Salah satu **Pihak** dapat mengakhiri **Perjanjian** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada **Pihak** lainnya.
3. Kewajiban **Pihak Kedua** untuk tidak mengungkapkan akan terus berlangsung selamanya setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.

**PASAL 6**

**TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK**

Tidak ada dalam **Perjanjian** ini yang akan diartikan untuk memindahkan segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Data Regsosek kepada **Pihak Kedua**, atau hak untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Data Regsosek

tersebut. **Perjanjian** ini tidak dalam cara apapun mengikat **Para Pihak** untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. Perjanjian apapun untuk hubungan bisnis tersebut akan dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara terpisah yang dilakukan oleh **Para Pihak**.

**PASAL 7**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Perjanjian** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 8**

**PIHAK KETIGA**

1. Kecuali untuk pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 **Perjanjian**, sebelum pengungkapan Data Regsosek kepada suatu pihak ketiga, **Pihak Kedua** wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Pertama** untuk mengungkapkan Data Regsosek kepada pihak ketiga tersebut.
2. Atas persetujuan tertulis yang telah diberikan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud ayat (1), **Pihak Kedua** bersama pihak ketiga tersebut wajib untuk:
3. menahan semua Data Regsosek sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian** ini dan untuk tidak menggunakannya untuk tujuan selain yang ditentukan dalam **Perjanjian** ini, dan
4. mengembalikan semua Data Regsosek kepada **Pihak Ketiga** tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender setelah pihak ketiga tersebut menyelesaikan pekerjaannya.
5. Setiap pengungkapan dari Data Regsosekharus sesuai dengan hukum yang berlaku.

**PASAL 9**

**PENGEMBALIAN DATA REGSOSEK**

1. **Pihak Kedua** setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada **Pihak Pertama**, atas permintaan **Pihak Pertama** setiap dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan Data Regsosek dan setiap salinan yang dibuat oleh karenanya yang **Pihak Kedua** mungkin miliki, memiliki akses kepadanya, atau mungkin dapatkan atau kuasai selama periode pembicaraan itu dan/atau hubungan bisnis dengan **Pihak Pertama**.
2. Atas penghentian pembicaraan dan/atau hubungan bisnis antara **Para Pihak**, **Pihak Kedua** harus menyampaikan kepada **Pihak Pertama**, atas permintaan **Pihak Pertama**, segala Data Regsosek yang dikuasainya atau di bawah kendalinya tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender.

**PASAL 10**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** adalah suatu Instansi yang didirikan dan sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum dan melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia.
2. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani **Perjanjian** ini adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili **Para Pihak** dalam **Perjanjian** ini berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi **Para Pihak**.
3. **Pihak Kedua** menjamin kerahasiaan atas Akun Sepakat dan Data Regsosek sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab secara hukum terhadap segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari serta membebaskan **Pihak Pertama** dari segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari atas terbukanya Akun Sepakat dan Data Regsosek dimaksud, selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** bertanggungjawab atas kebocoran Akun Sepakat dan Data Regsosek dan/atau *fraud*/kecurangan yang dilakukan oleh Pengguna Data, Operator, dan/atau Pegawai dan bertanggung jawab atas segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul akibatnya serta membebaskan **Pihak Pertama** dari segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul dimaksud selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua.**

**PASAL 11**

**KORESPONDENSI**

1. Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.
2. Rincian alamat dan masing-masing **Pihak** untuk setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau dikirimkan berdasarkan atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
3. Kepada **Pihak Pertama**:

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : | Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 |
| Telepon | : | (021) 3915227/(021) 3141087 |
| Email | : | [ditpk@bappenas.go.id](mailto:ditpk@bappenas.go.id) |

1. Kepada **Pihak Kedua**:

(*Menyebutkan unit kerja Kementerian/Lembaga yang berperan sebagai Walidata / perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang menjalankan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah* )\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alamat |  | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Telepon |  | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Email |  | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat dan disampaikan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan atau dalam kaitannya dengan **Perjanjian** ini akan berlaku efektif, jika disampaikan melalui surat, ketika disampaikan pada alamat yang telah ditentukan atau 5 (lima) hari kerja setelah disampaikan melalui layanan pos tercatat dalam amplop yang ditujukan ke alamat tersebut, dan jika suatu departemen atau pejabat tertentu ditentukan sebagai bagian dari detail alamat berdasarkan ayat (1), jika dialamatkan kepada departemen atau pejabat tersebut.
2. Setiap komunikasi yang akan dilakukan di antara salah satu dari **Para Pihak** berdasarkan atau dalam kaitan dengan **Perjanjian** ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau sarana elektronik lain, jika **Para Pihak** terkait:
3. sepakat bahwa, kecuali jika dan sampai diinformasikan sebaliknya, komunikasi elektronik ini merupakan bentuk komunikasi yang disetujui;
4. saling menginformasikan secara tertulis mengenai alamat surat elektronik dan/atau informasi lain yang diperlukan untuk memungkinkan dikirim serta diterimanya informasi melalui sarana-sarana tersebut; dan
5. saling menginformasikan mengenai tiap perubahan pada alamat surat elektroniknya atau tiap informasi lain yang diberikan lainnya.
6. Tiap komunikasi elektronik yang dilakukan di antara **Para Pihak** akan berlaku hanya pada saat diterima dengan sebenarnya dalam bentuk yang dapat dibaca.
7. Tiap komunikasi elektronik yang jatuh efektif pada selain hari kerja atau setelah jam kerja di tempat penerimaan, hanya akan dianggap efektif diterima pada hari kerja berikutnya di tempat tersebut.

**PASAL 12**

**HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI,**

**DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. **Perjanjian** ini diatur, diartikan, dan diperlakukan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak** wajib menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tersebut gagal, maka **Para Pihak** sepakat mengajukan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermeterai cukup. Penandatanganan, pemindaian dan/atau transmisi secara elektronik atas **Perjanjian** ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli, dan tanda tangan yang dipindai dan/atau elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pihak Pertama,**  **TENI WIDURIYANTI** | **Pihak Kedua,**  **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |

\*Pilih satu satu sesuai dengan identitas **Pihak Kedua**.